

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Adanya isu antara Tiongkok dan Taiwan terkait wilayah sudah menjadi isu internasional mengingat pertikaian keduanya dimulai pada tahun 1900an sampai dengan saat ini. Konflik antara keduanya terjadi karena Taiwan menolak untuk menjadi bagian dari Tiongkok atau dalam artian tidak menerima prinsip satu Tiongkok. Dalam statusnya jika dilihat secara internasional Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok yang didukung oleh resolusi PBB 2758 yang sudah disahkan sebagai penjelas status keduanya, yang kemudian ikut mendukung adalah negara-negara kemudian memilih tidak bekerja sama dengan Taiwan secara resmi karena lebih memilih mendukung prinsip tersebut.

Dalam melihat analisis dari kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan kemudian kita dapat melihat bahwa *Goals* dari masalah ini adalah penyatuan atas kedua wilayah, yang dilihat oleh Tiongkok sebagai kegagalan apabila tidak dapat bersatu, prinsip satu Tiongkok yang termasuk dalam hal tersebut juga merupakan komponen *China dreams* Tiongkok oleh Hu. Selain itu yang melatar belakangi pandangan ini adalah wilayah Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari agenda trasisi ekonomi, politik dan sosial, tidak dapat di pungkiri bahwa kondisi dari Taiwan kemudian menjadi legitimasi yang membentuk *Goals* Tiongkok atas wilayah tersebut. Sehingga ambisi Tiongkok kemudian tidak bisa dilihat hanya sebatas aspek sejarah yang dirasa sebagai pernghinaan atas separatistis oleh Taiwan namun diiringi oleh kepentingan lainnya dalam pengembangan negaranya saat ini.

Selain itu *Goals* yang dapat diperhatikan adalah dari adanya kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar. Dari pandangan Tiongkok seperti wilayah Taiwan yang dianggap strategis yang kemudian bisa digunakan oleh negara lain yang berkuasa disana sebagai bumerang untuk mengganggu ketenangan impormaritim negaranya. Selain itu didukung wilayah Taiwan yang memiliki SDA yang baik yang menjadikanya lebih menarik untuk dilakukan penyatuan.

Dalam mencapai *Goals* maka aspek *objectives* dari kebijakan Tiongkok tidak dapat dipisahkan mengingat suatu pencapaian akhir atau *Goals* dapat tercapai apabila suatu *objectives* dari sasaran kebijakan berjalan dengan baik dan tercapai. Dalam penelitian ini kemudian dapat diamati objektifitas dari Tiongkok adalah mempertahankan status quo yang telah di bentuk sejak tahun 1992, hal ini dirasa penting sebagai gerakan awal dalam menahan kemerdekaan Taiwan dan sekaligus bentuk pencapaian prinsip satu Tiongkok. Status quo tersebut adalah pertahanan awal untuk memperjelas status dari Taiwan bahwa wilayahnya adalah bagian dari Tiongkok sekaligus menekankan ke dunia internasional bahwa prinsip satu Tiongkok dalam status quo tersebut tetap ada.

Selain itu dapat diamati sebagai *objectives* adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat Taiwan merupakan salah satu yang utama karena tidak dapat diraih suatu penyatuan apabila masih banyak masyarakat yang mendukung untuk merdeka. Pemerintah Tiongkok melihat peluang dari kekuatan masyarakat yang dapat menekan atau memperngaruhi keputusan pemerintah dalam kasus terkait. Sehingga dalam masalah ini banyak kebijakan oleh Tiongkok untuk

masyarakat Taiwan seperti penyediaan dana bagi pengusaha yang ingin meminjam dana maupun program khusus untuk petani maupun pelajar.

Dari banyaknya kebijakan yang dibuat kemudian bisa mendorong perpindahan, investasi dan interaksi masyarakat Taiwan dengan pemerintah Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan alternatif yang dipilih pada 2010 di mana kebijakan yang dipilih adalah melanjutkan kerja sama ekonomi antar selat, yang dirasa diawali oleh banyaknya interaksi dan pergerakan masyarakat Taiwan di Tiongkok yang semakin lama membuat pemerintahan Taiwan menyadari bahwa sudah saatnya membuka kerja sama ekonomi yang lebih serius diantara kedua wilayah, terutama kerja sama antar masyarakat Taiwan yang tidak dapat dikontrol dari waktu ke waktu mengingat bahwa Tiongkok sangat menjanjikan. Hal ini bisa diamati dari pemerintahan Ma Ying Jeou sebagai awal hubungan ekonomi antara pemerintah dalam kerja sama antar selat yang semakin erat.

Dalam melihat keseriusan Tiongkok dalam pemilihan alternatif ini dapat kemudian diamati dari adanya ECFA pada 2010 sebagai kerja sama berkelanjutan dan dikatakan sebagai kemajuan paling signifikan dalam sejarah hubungan antar keduanya. Dalam penggunaan alternatif kerja sama ekonomi ini kita juga dapat melihat bahwa alternatif dengan melanjutkan operasi militer dirasa tidak efektif mengingat tidak adanya perubahan akan diterimanya kebijakan prinsip satu Tiongkok oleh Taiwan sehingga usaha yang diberikan oleh Tiongkok tidak menghasilkan apapun, selain ini dengan jalur militer Tiongkok kemudian semakin membuat negara-negara di dunia semakin tidak percaya akan kedamaian yang disuarakan oleh Tiongkok terkait dengan *China's peaceful rise*. Sehingga dalam

masalah ini yang dipilih pada tahun 2010 sebagai alternatif adalah melanjutkan kerja sama ekonomi antar selat.

Dalam pemilihan kerja sama ekonomi tersebut sebagai pilihan kebijakan juga tidak terlepas dari *consequences* yang ada dalam setiap alternatif yang ada terkait dengan isu tersebut. Dapat diamati bahwa keuntungan dari kerja sama ekonomi antar selat lebih banyak dan menguntungkan seperti mendapatkan kepercayaan masyarakat Taiwan untuk merdeka, mempertahankan status quo sementara dari pada kemerdekaan Taiwan yang dirasa sebagai kemunduran atas usaha Tiongkok. Selain itu terdapat keuntungan depedensi yang sangat penting dalam mempertahankan Taiwan sebagai wilayah negaranya.

Depedensi dirasa adalah salah satu tujuan yang penting dalam kerja sama ekonomi, karena dengan adanya keterikatan Taiwan dengan negaranya maka akan semakin mudah Tiongkok menegosiasikan prinsip satu Tiongkok dan dikatakan Taiwan tidak akan mudah untuk memutuskan hubungan ekonomi karena investasi dan eksportnya dengan Tiongkok yang terlalu berasa. Sehingga memunculkan pandangan semakin besar keterikatan maka akan semakin mudah prinsip tersebut tercapai. Sedangkan dalam kerugian dari kebijakan ini Tiongkok hanya perlu mengeluarkan dana yang lebih dalam menyediakan fasilitas untuk Taiwan.

Sedangkan dalam alternatif militer kerugian dari segi pendanaan jauh lebih besar dan merugikan, terlebih bergabungnya AS sebagai aliansi terkuat Taiwan menjadikan dilema keamanan tidak dapat dihindari maka dari itu pendanaan untuk militer dari Tiongkok mau tidak mau harus ditingkatkan. Walaupun ada saat itu

ekonomi Tiongkok dapat mengimbangi pengeluaran namun tetap saja dana yang dikeluarkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan alternatif sebelumnya selain itu hal ini dapat menimbulkan kecemasan internasional yang kemudian dapat merusak citra Tiongkok yang sudah dibangun atas dasar damai. Maka dari itu dari perbandingan *consequences* tersebut kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang tepat dan paling mendekati pencapaian prinsip satu Tiongkok.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis akan memberikan rekomendasi terkait dengan isu yang sama dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memperkaya penelitian-penelitian dengan topik terkait. Penelitian ini belum membahas perspektif dari Taiwan terkait dengan usaha-usaha yang diberikan oleh Tiongkok dalam masalah prinsip satu Tiongkok yang terus diusahakan dengan berbagai macam kebijakan. Selain itu dapat juga dibahas terkait dengan bagaimana pandangan dan usaha Amerika Serikat dalam membantu Taiwan untuk merdeka mengingat negara tersebut tidak dapat dipisahkan dari peralatan senjata yang di peroleh Taiwan pada periode tersebut.